

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KERANGKA PENDANAAN**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2013 dan Perkiraan Tahun 2014**

**3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013**

Kinerja Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 6,55 persen, sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 7,27 persen. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2013 dimaksud lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**  
**Tahun 2010 – 2013**

<b>Keterangan</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)		(3)	(4)	(5)	(5)
1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	778.566	884.144	1.001.720	1.136.326,87
2.	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	342.281	366.984	393.674	419.428,45
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,68	7,22	7,27	6,55

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,55 persen didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama Jawa Timur tahun 2013 yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, dan sektor pertanian, yang sumber pertumbuhannya mencapai 4,42 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran Jawa Timur tumbuh sebesar 8,61 persen, industri pengolahan dan pertanian masing-masing tumbuh 5,59 persen dan 1,59 persen.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Tahun 2010-2013 (%)**

<b>Sektor</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian	2,23	2,53	3,49	1,59
2.	Pertambangan & Penggalian	9,18	6,08	2,10	3,30
3.	Industri Pengolahan	4,32	6,06	6,35	5,59
4.	Listrik,Gas & Air Bersih	6,43	6,25	6,21	4,74
5.	Konstruksi	6,64	9,12	7,05	9,08
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	10,67	9,81	10,06	8,61
7.	Pengangkutan & Komunikasi	10,07	11,44	9,65	10,43
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	7,27	8,18	8,01	7,68
9.	Jasa-jasa	4,34	5,08	5,07	5,32
<b>PDRB</b>		6,68	7,22	7,27	6,55

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Kontribusi sembilan sektor lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.3. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31,34 persen, sektor industri pengolahan 26,60 persen dan sektor pertanian 14,91 persen. Selama lima tahun terakhir struktur ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan.

**Tabel 3.3**  
**Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2010-2013 (%)**

<b>Sektor</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian	15,75	15,38	15,38	14,91
2.	Pertambangan & Penggalian	2,19	2,24	2,09	2,00
3.	Industri Pengolahan	27,49	27,12	27,13	26,60
4.	Listrik,Gas & Air Bersih	1,51	1,43	1,35	1,29
5.	Konstruksi	4,49	4,67	4,55	4,74
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	29,47	29,99	30,41	31,34
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5,52	5,66	5,70	5,94
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	4,90	4,97	5,04	5,10
9.	Jasa-jasa	8,68	8,55	8,35	8,09
<b>PDRB</b>		100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melambat ini terjadi karena belum pulihnya perekonomian global khususnya di negara Negara-negara Amerika, Eropa maupun Asia Timur Raya. Kondisi ini mempengaruhi transaksi ekspor luar negeri Jawa Timur ke negara-negara di kawasan tersebut yang merupakan pasar utama produk Jawa Timur. Tumbuhnya konsumsi masyarakat dan transaksi perdagangan antar daerah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ketika ekonomi global yang menjadi pendorong kinerja ekspor luar negeri mengalami kontraksi. Hal tersebut dapat dicermati dari data perdagangan antar provinsi tahun 2013 mengalami surplus sebesar 70,42 trilyun rupiah dan secara keseluruhan surplus perdagangan Jawa Timur tahun 2013 sebesar 53,73 trilyun rupiah. Kinerja tersebut tidak terlepas peran dari stimulus Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memperkuat peran Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur yang didirikan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini mencapai 26 KPD di 26 Provinsi. Kondisi di atas tercermin dari data PDRB menurut penggunaan tahun 2013 yang disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Penggunaan  
Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Konsumsi Rumahtangga</b>	<b>667.262.545,95</b>	<b>765.998.234,18</b>
	a. Makanan	370.217.105,19	411.791.164,50
	b. Non Makanan	297.045.440,76	354.207.069,67
<b>2</b>	<b>Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung</b>	<b>6.241.016,64</b>	<b>6.885.725,25</b>
<b>3</b>	<b>Konsumsi Pemerintah</b>	<b>68.622.312,07</b>	<b>75.373.615,64</b>
<b>4</b>	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>201.490.585,12</b>	<b>224.397.534,02</b>
<b>5</b>	<b>Perubahan Inventori</b>	<b>7.132.489,53</b>	<b>9.943.042,72</b>
<b>6</b>	<b>Ekspor</b>	<b>523.658.648,86</b>	<b>585.517.210,51</b>
	a. Antar Negara/Luar Negeri	222.170.517,34	239.495.370,03
	b. Antar Provinsi	301.488.131,52	346.021.840,48
<b>7</b>	<b>Impor</b>	<b>473.206.853,34</b>	<b>531.788.493,89</b>
	a. Antar Negara/Luar Negeri	234.573.606,94	256.183.662,16
	b. Antar Provinsi	238.633.246,40	275.604.831,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1.001.720.879,47</b>	<b>1.136.326.868,44</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,55 persen di tahun 2013 dimaksud, didukung oleh kinerja investasi juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama tahun 2013. Total realisasi investasi pada tahun 2013 meningkat sebesar 8,72 persen dibandingkan tahun 2012 dengan total nilai sebesar 145,06 triliun rupiah. Investasi daerah masih mendominasi dengan nilai 76,58 triliun rupiah, kemudian disusul oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 34,85 triliun rupiah dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 33,63 triliun rupiah.

Selanjutnya kinerja perbankan baik Bank Umum maupun Bank BPR sebaga salah satu motor penggerak ekonomi Jawa Tiimur, pada triwulan IV-2013, menunjukkan perkembangan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari indikator total aset, kredit dan DPK yang tumbuh dengan baik serta didukung oleh tingkat risiko kredit yang rendah (kurang dari 5%) dan stabil. Aset Bank Umum dan BPR tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 18,8% (yoy) hingga mencapai Rp 429,98 triliun pada Triwulan IV 2013. Kredit tumbuh sebesar 26,71% (yoy) dari sebesar Rp 291,26 triliun pada Triwulan III 2013 menjadi sebesar Rp 310,96 triliun pada Triwulan IV 2013. Demikian pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum dan BPR di Jawa Timur yang mencatat pertumbuhan sebesar 15,9% (yoy) menjadi sebesar Rp 340,96 triliun. *Loan to Deposit*

Ratio (LDR) Bank Umum mencapai 90,70 % dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) mampu terjaga di bawah 5% yaitu 1,75. Peningkatan kinerja Bank Umum dan BPR di Jawa Timur terutama didorong oleh terjaganya kondisi perekonomian nasional dan daerah. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan kredit yang terus meningkat hingga mencapai kisaran 27% (yoy) pada Triwulan IV 2013, maka peluang sumbangan sektor perbankan atas peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan masih akan terus meningkat

Sementara itu, khusus untuk perkembangan kredit UMKM terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut tercermin dari perkembangan kredit UMKM yang disalurkan terus mencatat peningkatan hingga mencapai Rp 83,26 triliun pada periode IV 2013 atau tumbuh 20,51% (yoy) dengan NPL sebesar 3,29 %. Searah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM oleh perbankan di Jawa Timur diperkirakan akan terus tumbuh positif. Dengan kondisi tersebut, diharapkan kedepan UMKM dapat lebih berperan dalam membangun pondasi kekuatan ekonomi riil Jawa Timur dalam menyediakan kesempatan kerja maupun dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sebagai ilustrasi kinerja perbankan di Jawa Timur disajikan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5  
Perkembangan Indikator Perbankan (Bank Umum & BPR) di Jawa Timur

INDIKATOR BANK UMUM DAN BPR (Miliar Rp)	2012		2013			
	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset	350,677.74	361,922.83	370,892.76	388,441.32	416,268.97	429,976.45
Pertumbuhan (%yoy)	22.13	20.79	19.18	17.63	18.70	18.80
Dana Pihak Ketiga	278,400.34	293,979.22	292,804.92	298,892.15	318,994.08	340,710.71
Pertumbuhan (%yoy)	18.03	16.46	13.94	12.10	14.58	15.90
Kredit	229,312.65	245,419.66	251,401.19	272,050.57	291,265.74	310,960.80
Pertumbuhan (%yoy)	24.38	26.18	27.03	26.16	27.02	26.71

Sumber: Bank Indonesia

3.1.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2014

Sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah 6,88% – 7,19%. Target dimaksud diharapkan akan dapat tercapai dengan berbagai asumsi penting diantaranya stabilitas makro ekonomi dan moneter terkendali dengan

inflasi yang telah diproyeksikan  $5 \pm 1$ . Analisis terhadap kondisi eksternal yang barangkali masih belum prospektif, maka memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan strategi penting untuk mampu mendukung kinerja perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi.

Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

#### **1) Lingkungan eksternal (Global)**

**Pertama,** Negara negara tujuan ekspor utama dari Jawa Timur diharapkan sudah terdapat pemulihan ekonomi secara signifikan, khususnya di Amerika serta Eropa maupun di negara-negara Asia . Stabilitas makro ekonomiglobal menjadi penting untuk untuk dapat mempengaruhi permintaan (ekspor) luar negeri yang pada 2013 secara nasional masih terjadi defisit, dan berpengaruh pula terhadap neraca transaksi berjalan perdagangan Jawa Timur untuk ekspor dan impor luar negeri.

**Kedua,** Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta Eropa Timur khususnya mengenai krisis Rusia - Ukraina diharapkan segera berakhir sehingga tidak berimbas stabilitas makro ekonomi global.

**Ketiga,** Harga pangan dunia khususnya jenis sereal yang relatif cenderung murah, tidak akan mengakibatkan Indonesia pada "JEBAKAN IMPOR PANGAN" yang pada akhirnya merugikan produksi domestik. Disamping itu, kondisi supply energi global diharapkan pula tidak mengakibatkan dinamika harga minyak mentah dunia diatas proyeksi nasional, sehingga negara masih mampu mengalokasikan subsidi sesuai proyeksi dan gejolak inflasi tidak akan terjadi.

**Keempat,** Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 sebagai pasar tunggal/pasar bersama masyarakat ASEAN diharapkan akan menjadi peluang untuk mampu meningkatkan kapasitas perdagangan serta dampak di sektor produksi domestik termasuk Jawa Timur.

#### **2) Lingkungan Internal (Nasional)**

**Pertama,** Pelambatan ekonomi nasional tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,78% dari sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh 6,23 %,

diharapkan tidak akan berkepanjangan, walaupun neraca transaksi berjalan belum menunjukkan kinerja maksimal, namun setidaknya appraisal dari IMF yang memberikan penilaian ekonomi Indonesia berada pada jalur yang benar, akan menjadi pendorong kinerja perekonomian nasional, yang tentunya harmonisasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal mampu mendorong tumbuhnya sektor riil.

**Kedua**, Beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih terjadi dinamika. Beberapa indikator ekonomi tahun 2014 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain inflasi 5,4 – 5,7 persen, Suku bunga acuan (SPN 3 bulan) tetap dijaga pada suku bunga riil 5,5 – 6,0 persen, lifting minyak 800 – 830 ribu barel per hari, kurs rupiah sebesar Rp 11.500 – Rp 12.000 per US Dollar.

**Ketiga**, Agenda politik pemilihan presiden 2014 akan memiliki sentimen terhadap pasar modal dan investasi. Pelaku usaha cenderung akan menunggu hasil pemilihan presiden, sehingga kondusifitas situasi sosial politik terkait agenda tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

### 3) Lingkungan Internal (Provinsi)

**Pertama**, Indikator makro ekonomi khususnya pertumbuhan Jawa Timur sejak tahun 2009 sebesar 5,10% terus mengalami percepatan sampai tahun 2012 yang tumbuh menjadi 7,27%. Namun pada tahun 2013 mengalami perlambatan, namun mampu tumbuh 6,55% diatas nasional sebesar 5,78% dengan inflasi kumulatif mencapai 7,59 persen.

**Kedua**, Konsumsi masyarakat Jawa Timur yang mencapai 67,41% dan nasional mencapai 55,82% saat ini menunjukkan kekuatan fundamental, ketika lingkungan eksternal masih mengalami distorsi baik di Eropa, Amerika Serikat serta krisis di Timur Tengah. Oleh karena itu perkutana Kantor Perwakilan Dagang (KPD) sangat stratgis untuk meningkatkan kinerja perdagangan Jawa Timur.

**Ketiga**, Berbagai kerangka regulasi yang menjadi stimulan dalam percepatan ekonomi di Jawa Timur antara lain :

1. Perkembangan reformasi birokrasi yang ditandai dengan berbagai kepuasan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, khususnya perijinan satu pintu, sistem pengadaan barang dan jasa publik, penggunaan teknologi informasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM Aparatur, semakin menunjukkan efisiensi pembangunan yang diindikasikan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang sangat efisien sebesar 2,92 serta Indonesia Government Index (IGI) peringkat kedua sebesar 6,43 maupun tata kelola ekonomi daerah, dari 35 teratas, 17 kabupaten/Kota adalah dari Jawa Timur.

2. Jaminan investasi pemerintah provinsi baik dalam hal: (a) iklim perburuan yang demokratis, (b) surplus energi listrik, (c) fasilitasi pengadaan tanah untuk investor dan (d) pelayanan perijinan satu pintu (PTSP) oleh UPT P2T akan mampu mempercepat investasi langsung (*direct investment*) baik domestik maupun asing.
3. Sistem kapitasi yang berpihak pemberdayaan sektor riil, koperasi dan UMKM, yang diindikasikan dengan (a) tuntasnya pembentukan lembaga keuangan mikro pedesaan/kelurahan sebanyak 8.506 koperasi wanita sejak 2009 sampai dengan tahun 2010; penambahan modal kembali terhadap kopwan berprestasi, serta direncanakan pengembangan lembaga pembiayaan berbasis kelompok wanita fungsional dan kelompok ekonomi mikro lainnya (LMDH, Kopontren dan kopkar), (b) Optimalisasi dan penguatan *linkage* program Bank Jatim-BPR, (c) Optimalisasi dan perluasan penjaminan kredit bagi UMKM yang layak namun kurang memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, yaitu PT Jamkrida.

**Keempat,** Percepatan berbagai pembangunan infrastruktur, antara lain :

1. Menyusun Rencana Induk Pemerintah Provinsi terkait pengembangan Jaringan Jalan, Pelabuhan, Kereta Api maupun Bandara.
2. Memfasilitasi rencana pembangunan pelabuhan – pelabuhan baru, baik pelabuhan Utama, pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan pengumpan.
3. Mendorong dan memfasilitasi Percepatan realisasi Pengerukan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

4. Memfasilitasi terwujudnya Transportasi Udara yang nyaman dan efektif menyongsong kesiapan bandara Juanda (Enclave) terhadap pemberlakuan liberalisasi penerbangan *Asean Open Sky* tahun 2015) melalui peningkatan kapabilitas prasarana dan sarana, baik melalui pembangunan Terminal 3, pembangunan Runway sepanjang 4.000 x 60m, Apron, taxiway dan exit taxiway ataupun pengembangan Bandara dari 477,3 Ha menjadi minimal 1.000 Ha atau dilokasi lain sesuai RTRW Provinsi.
5. Mengupayakan dan memfasilitasi perpanjangan exit jalan tol dari hanya 500m menjadi 2-3 Km untuk mengurangi terjadinya potensi kemacetan dan kepentingan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol
6. Memfasilitasi pembangunan jalan penghubung (*connecting road*) menuju arteri maupun tol Surabaya – Gresik.
7. Merealisasikan pertambahan panjang jalan provinsi serta peningkatan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik.
8. Menstimulasi percepatan penggantian Lahan Milik Perhutani, mempercepat pelaksanaan pengukuran penggunaan kawasan hutan Kabupaten Trenggalek serta mendorong percepatan pembangunan fisik jalan pada Kabupaten Malang dan Banyuwangi;
9. Merealisasikan pembangunan jalan tembus Lawang-Batu;
10. Memfasilitasi dan menstimulasi percepatan pembangunan beberapa *flyover* baik di Kabupaten Sidoarjo maupun Kabupaten Gresik sebagai akses langsung dari Teluk Lamong ke Romokalisari;
11. Memfasilitasi dan menstimulasi perpanjangan pembangunan jaringan rel kereta api jalur ganda dari Pasar Turi menuju dermaga-dermaga pelabuhan, yaitu Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Tembaga di Probolinggo dan Tanjungwangi di Banyuwangi.
12. Memfasilitasi dan menstimulasi pertambahan panjang jalan nasional serta peningkatan panjang jalan dalam keadaan baik.
13. Memfasilitasi percepatan penyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan Tol, Jalan Non Tol, pelabuhan maupun infrastruktur untuk kepentingan umum lainnya.



**Kelima,** Sistem kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik dengan berbagai skema antara lain :

1. Penguatan kelembagaan 24 Perwakilan dagang di 24 Provinsi kerjasama domestik yang diarahkan pada *business inteligent* untuk membantu penetrasi perdagangan dalam negeri.
2. Kerjasama *sister province* maupun *non sister province* untuk tujuan *capital inflow* maupun memperluas pasar ekspor ke negara potensial maupun negara non konvensional.
3. MoU dengan BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional/Internasional dalam hal optimalisasi pemanfaatan dana CSR/PKBL.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016**

#### **3.1.2.1. Tantangan Perekonomian 2015 dan 2016**

Dengan fenomena perekonomian yang terjadi pada tahun 2012 menuju tahun 2013, serta proyeksi perekonomian tahun 2014 maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Mutasi Arus Modal keluar** (*Capital outflow*); menjelang berakhirnya suku bunga murah negara maju AS memangkas kembali stimulus sebesar 10 miliar dolar AS dan menjadi 55 miliar dolar AS tiap bulannya pada awal tahun 2014, serta rencana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25 persen menjadi 1 persen pada akhir 2015 dan 2,25 persen pada 2016. Kondisi ini telah memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan Asia kembali ke Amerika Serikat. Pengumuman itu juga telah membuat pasar keuangan Asia menjadi panik sehingga sejumlah mata uang seperti baht Thailand, peso Filipina, yuan Tiongkok, ringgit Malaysia dan won Korea Selatan serta rupiah terdepresiasi cukup tajam terhadap dollar AS. Efek kepanikan pasar juga berpengaruh pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam jangka pendek 2014-2016 ekonomi Indonesia akan disibukkan dengan perumusan kebijakan antisipasi pengurangan dan penghentian *Quantitative Easing* (QE) III, serta dinaikkannya suku bunga acuan The Fed yang diprediksi akan berdampak pada pembalikan modal ke

negara maju sehingga akan berpotensi menyebabkan gejolak pada nilai tukar rupiah, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

2. **Pelemahan ekonomi negara-negara utama Asia** seperti Tiongkok, Jepang dan India. Sepanjang 2013 hingga triwulan 1-2014, ekonomi Jepang, Tiongkok dan India terus melemah, serta mengalami perlambatan di luar perkiraan banyak kalangan. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus mengingat dampaknya berpeluang besar menekan ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia. Potensi terganggunya pertumbuhan di *emerging countries* akan semakin besar seperti tercermin dari kepanikan beberapa bank sentral di negara berkembang : Afrika Selatan, Brasil, dan Turki yang menaikkan suku bunganya secara ekstrem setelah menghadapi lonjakan inflasi dan pelarian modal. Kondisi tersebut juga mulai dirasakan di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand paska melemahnya ekonomi utama Asia seperti Tiongkok dan Jepang. Perlu antisipasi terstruktur agar investor kembali tertarik ke Indonesia (khususnya Jawa Timur, yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi) karena arus modal cenderung tertarik ke negara-negara yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi tinggi.
3. *Globalisasi* perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui *international trade friendship*. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan.
4. *Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*

Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada

industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya (*labour intensive industry*).Pengurangan kemiskinan,pengurangan disparitas dan pegurangan pengangguran merupakan instrumen korelatif dari percepatan pertumbuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu basis investasi dan ekspor merupakan vaiabel penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan dengan distribusi pendapatan yang merata dan mampu mengurangi disparitas.

##### 5. *Penanganan Bencana Alam*

Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi (*un-predictable*), namun bisa juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam), manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana.

#### **3.1.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015 dan Tahun 2016**

Pada koridor perencanaan RPJMD 2009-2014, hingga tahun keempat 2012, kinerja ekonomi di Jawa Timur menunjukkan percepatan dan selalu diatas rata-rata nasional. Realita yang berbeda terjadi pada pertumbuhan tahun 2013 yang mengalami perlambatan. Melambatnya perekonomian Jawa Timur ini sebagai imbas dari gejolak perekonomian Global terutama Uni Eropa yang merembet hingga Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS melalui The Fed menggulirkan *Tapering Off* yang berdampak pada penarikan arus modal asing kembali ke Amerika Serikat sehingga banyak negara (termasuk Indonesia) yang mengalami gejolak pada nilai tukar mata uang, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagangan dan neraca pembayarannya. Kondisi ini memasuki era transisi RPJM baru tahun 2014-2019 diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2014 dan secara gradual mulai akan berkurang pada tahun 2015 - 2016 mendatang. Untuk itu perekonomian Jawa

Timur tahun 2014 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,56 % - 6,87 %.

Struktur ekonomi Jawa Timur tahun 2015 dan 2016, jika ditinjau berdasarkan pengaruh eksternalitas krisis utang Eropa dan Amerika yang sampai saat ini masih terjadi diperkirakan masih akan berlangsung/belum banyak mengalami perubahan yang ekstrim bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan masih akan ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Dampak gejolak akibat krisis geopolitik di Uni Eropa yang menjalar ke Timur Tengah hingga Amerika, dari sisi moneter mengakibatkan terjadinya perubahan nilai tukar yang berpengaruh signifikan pada meningkatnya laju inflasi. Disisi lain kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Jawa Timur tahun 2015 dan 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan kembali pada kisaran  $5 \pm 1$  % per tahun, maka prospek ekonomi Jawa Timur 2015 dan 2016 akan lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,88 % - 7,19 % dan tahun 2016 diperkirakan tetap pada kisaran 7,20 % - 7,49 %.

Di bidang pembiayaan sektor riil, diharapkan bank-bank di Jawa Timur dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri secara eksplisit telah menunjukkan keberpihakan terhadap sektor riil dengan berbagai skema pendanaan baik melalui kredit bunga rendah, penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT Jamkrida, penguatan lembaga keuangan mikro (Koperasi Wanita, Koppontren, Kopkar) dan penguatan lembaga pembiayaan berbasis fungsional.

### **3.1.3. Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai sub sistem pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada 2 fondasi utama, yaitu: (a) stabilitas makro ekonomi baik terkait kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, (b) produktivitas sektor riil yang

menjadi basis peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja di 9 sektor lapangan usaha. Kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari aspek kuantifikasi, diarahkan untuk peran stimulasi yang diharapkan mampu memobilisasi sumber-sumberdaya lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam kerangka RPJMD 2014-2019, pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif yang pada tahun 2015 difokuskan pada perkuatan kemandirian ekonomi melalui pembangunan industri hulu-hilir, agrobisnis dan agroindustri, UMKM serta infrastruktur.

Dengan konstruksi tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan mampu diwujudkan dan memberikan dampak terhadap kinerja penurunan pengangguran terbuka, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM serta penurunan disparitas wilayah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan perkuatan kemandirian ekonomi pada tahun 2015, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Pengendalian inflasi dibidang makro ekonomi yang diarahkan agar tetap terkendali dan berada pada batas kondusif  $5 \pm 1$  %, dengan mengoptimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta intervensi pasar terhadap komoditi tertentu pada situasi tertentu baik melalui subsidi ongkos angkut, operasi pasar dan kegiatan lain yang dapat menekan laju inflasi.
- 2) Meningkatkan kinerja investasi daerah melalui kerangka kebijakan berupa jaminan kemudahan investasi di bidang pelayanan perijinan, pengadaaan lahan, fasilitasi kemudahan akses energi maupun iklim perburuhan yang demokratis.
- 3) Strategi daya saing daerah diarahkan untuk meningkatkan (a) kualitas reformasi birokrasi baik di bidang regulasi, SDM kapasitas, pemanfaatan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun sistem pengawasan oleh pihak ketiga, (b) kualitas infrastruktur aksesibilitas darat, laut dan udara, kualitas pelayanan publik.
- 4) Dibidang pembiayaan sektor riil, kebijakan pembiayaan sektor riil diarahkan pada :
  - a) Mendorong Bank Umum dan PT BPR di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan porsi kredit kepada UMKM
  - b) Menambah penyertaan modal pada PT Bank UMKM untuk

- meningkatkan porsi kredit kepada UMKM
- c) Mempoosisikan PT Bank Jatim sebagai APEX Bank dari PT Bank UMKM
  - d) Mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan mikro di pedesaan/kelurahan baik berupa lembaga ekonomi perempuan, LMDH, Koperasi Karyawan maupun Koperasi Pondok Pesantren.
  - e) Mendukung kelancaran dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 5) Di bidang Investasi, diarahkan dengan (a) mengoptimalkan promosi investasi disertai dengan dukungan 4 jaminan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur, (b) mendorong percepatan realisasi investasi dari ijin – ijin prinsip yang telah mendapatkan persetujuan, (c) Investasi asing diarahkan untuk berorientasi ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan kandungan lokal yang semakin meningkat melalui kontribusi dari sektor perdagangan luar negeri, investasi dalam negeri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional serta insentif bagi investasi yang mendukung hilirisasi industri. Di bidang ini juga mulai dirintis upaya substitusi impor bahan baku/penolong dengan pembangunan industri smelter dan/atau industri yang memproduksi input agroindustri pengganti bahan baku impor.
- 6) Di Bidang Kemandirian pangan kebijakan diarahkan pada:
- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).
  - b) Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) pada sebaran lokasi potensial yang merata.
  - c) Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada

berbagai kawasan perdagangan.

- 7) Di bidang Industri dan Perdagangan, kebijakan diarahkan pada:
  - a) Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan.
  - b) Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor.
  - c) Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja.
  - d) Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan/penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
  - e) Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional.
- 8) Dibidang ekonomi kreatif, diarahkan dengan mengoptimalkan potensi melalui fasilitasi di bidang pembiayaan maupun kualitas produk serta pemasaran dan perlindungan terhadap hasil karya UMKM (HAKI).
- 9) Di Sektor UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk mengoptimalkan peran UMKM terhadap PDRB melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing (penguatan skill, manajemen dan pemasaran), penumbuhan wirausaha baru, perluasan dan penguatan lembaga ekonomi perempuan berbasis fungsional serta kelompok ekonomi mikro lainnya (LMDH, Kompondren dan Koperasi Buruh/Karyawan).
- 10) Di bidang infrastruktur dan transportasi, diarahkan untuk (a) mewujudkan konektivitas jalur Kereta Api dengan Pelabuhan untuk mempermudah dan mempercepat distribusi logistik nasional yang berdaya saing, (b) Menciptakan penyelenggaraan transportasi udara yang aman, nyaman dan efektif pada Bandara Enclave Juanda melalui peningkatan kapabilitas Sarana dan Prasarana (b) mendukung peningkatan produksi padi melalui revitalisasi waduk di berbagai Daerah Aliran Sungai
- 11) Di bidang energi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan peningkatan produktivitas industri melalui rencana-rencana pembangunan refinery, regastrifikasi, percepatan penyelesaian pembangunan PLTU (panas bumi), pembangkit listrik dengan sumber energi alternatif (energi baru terbarukan/EBT).

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.**

#### **3.2.1. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah**

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang dicapai Jawa Timur sebesar 6,55% lebih tinggi dari rata-rata Nasional menunjukkan bahwa Perekonomian di Jawa Timur lebih kondusif, diproyeksikan tahun 2014 tumbuh 6,56 – 6,87% dan tahun 2015 ditargetkan tumbuh sekitar 6,88 – 7,19 %. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah baik dari sektor pajak, retribusi maupun sumber pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan serta daerah optimalisasi kontribusi BUMD.

Sementara sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2014, tercantum pada tabel berikut:



Tabel 3.6  
Proyeksi Pendapatan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD 2015	PERKIRAAN MAJU 2016	PERKIRAAN MAJU 2017
		2012	2013	2014	2014			
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15.401.493.951.238,10</b>	<b>17.372.650.754.285,70</b>	<b>17.063.618.132.667,00</b>	<b>17.393.777.959.752,00</b>	<b>20.691.379.234.880</b>	<b>22.145.385.870.212</b>	<b>23.708.869.039.517</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>9.584.081.971.227,10</b>	<b>11.579.222.929.456,70</b>	<b>11.729.791.450.675,00</b>	<b>11.103.564.801.835,00</b>	<b>14.482.996.420.435</b>	<b>15.886.045.872.787</b>	<b>17.397.552.715.454</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	7.816.590.831.387,00	9.404.933.622.356,69	9.986.600.000.000,00	9.285.000.000.000,00	12.541.000.000.000	13.807.000.000.000	15.173.000.000.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	118.823.637.590,50	106.213.770.751,90	132.726.043.275,00	104.887.319.435,00	104.823.449.246	109.041.722.099	111.656.597.234
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	352.899.911.853,78	332.020.394.955,52	345.336.176.342,00	104.887.319.435,00	353.566.454.883	367.709.113.079	382.417.477.602
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.295.767.590.395,82	1.736.055.141.392,54	1.265.129.231.058,00	1.373.709.737.320,00	1.483.606.516.306	1.602.295.037.610	1.730.478.640.619
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3.069.016.101.831,00</b>	<b>3.092.884.299.095,00</b>	<b>2.518.489.768.957,00</b>	<b>3.459.730.701.917,00</b>	<b>3.407.812.754.445</b>	<b>3.458.769.937.424</b>	<b>3.510.746.264.063</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.523.964.905.831,00	1.374.591.582.095,00	800.197.051.957,00	1.491.306.546.917,00	1.503.933.605.745	1.516.813.205.750	1.529.950.397.755
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.491.561.136.000,00	1.632.648.287.000,00	1.632.648.287.000,00	1.866.548.185.000,00	1.903.879.148.700	1.941.956.731.674	1.980.795.866.307
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	53.490.060.000,00	85.644.430.000,00	85.644.430.000,00	101.875.970.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.748.395.878.180,00</b>	<b>2.700.543.525.734,00</b>	<b>2.815.336.913.035,00</b>	<b>2.830.482.456.000,00</b>	<b>2.800.570.060.000</b>	<b>2.800.570.060.000</b>	<b>2.800.570.060.000</b>
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	34.240.520.680,00	39.728.179.934,00	10.615.698.035,00	30.812.401.000,00	23.150.000.000	23.150.000.000	23.150.000.000
1.3.2	DANA DARURAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	2.714.155.357.500,00	2.660.815.345.800,00	2.804.721.215.000,00	2.799.670.055.000,00	2.777.420.060.000	2.777.420.060.000	2.777.420.060.000
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	DANA URUSAN BERSAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.748.395.878.180,00</b>	<b>2.700.543.525.734,00</b>	<b>17.063.618.132.667,00</b>	<b>17.393.777.959.752,00</b>	<b>20.691.379.234.880</b>	<b>22.145.385.870.212</b>	<b>23.708.869.039.517</b>

Catatan \*) tahun 2013, angka realisasi anaudit

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2014 dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Belanja Daerah**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD	PERKIRAAN MAJU	PERKIRAAN MAJU
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.161.976.515.887,30</b>	<b>16.711.548.513.611,50</b>	<b>17.746.162.857.974,00</b>	<b>17.811.135.360.418,00</b>	<b>21.329.789.585.841,00</b>	<b>22.708.948.531.700,00</b>	<b>24.198.338.580.851,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.633.570.876.338,18</b>	<b>10.602.764.655.355,80</b>	<b>13.041.218.345.974,00</b>	<b>11.769.244.344.168,00</b>	<b>13.763.001.285.134,00</b>	<b>14.467.278.260.031,00</b>	<b>15.226.167.186.725,00</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.486.342.134.346,32	1.533.121.238.703,00	1.898.445.247.600,00	1.960.973.671.000,00	2.187.983.072.744,00	2.411.082.582.571,00	2.655.585.515.299,00
2.1.2	BELANJA BUNGA	6.036.025.188,68	5.108.753.406,26	5.516.766.111,00	4.174.939.236,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	3.865.450.909.599,68	4.903.476.407.650,87	4.338.710.267.500,00	4.536.420.310.000,00	4.527.420.060.000,00	4.527.420.060.000,00	4.527.420.060.000,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.990.102.000,00	32.555.112.974,68	32.925.900.000,00	12.149.380.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.702.288.006.485,00	3.081.718.245.832,00	4.452.599.787.729,00	3.463.118.747.850,00	5.066.078.813.909,53	5.512.585.006.651,86	5.988.898.791.668,06
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA	1.477.431.620.316,00	986.232.679.029,00	2.263.020.377.034,00	1.728.357.577.316,00	1.831.519.338.480,00	1.866.190.610.808,00	1.904.262.819.758,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	51.032.078.402,50	60.552.217.760,00	50.000.000.000,00	64.049.718.766,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.528.405.639.549,12</b>	<b>6.168.783.858.255,68</b>	<b>4.704.944.512.000,00</b>	<b>6.041.891.016.250,00</b>	<b>7.566.788.300.706,99</b>	<b>8.241.670.271.669,29</b>	<b>8.972.171.394.125,41</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.019.269.016.865,00	1.164.927.756.070,00	865.083.845.928,00	698.358.821.414,00	1.362.021.894.127,00	1.401.083.946.184,00	1.345.825.709.119,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.451.771.438.875,62	3.828.105.056.051,68	2.681.136.723.551,00	4.124.057.783.357,00	4.313.069.331.403,00	4.615.335.352.135,00	4.934.694.266.769,00
2.2.3	BELANJA MODAL	1.057.365.183.808,50	1.175.751.046.134,00	1.158.723.942.521,00	1.219.474.411.479,00	1.891.697.075.177,00	2.225.250.973.351,00	2.691.651.418.238,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>15.161.976.515.887,30</b>	<b>16.711.548.513.611,50</b>	<b>17.746.162.857.974,00</b>	<b>17.811.135.360.418,00</b>	<b>21.329.789.585.841,00</b>	<b>22.708.948.531.700,00</b>	<b>24.198.338.580.851,00</b>

### **3.2.2. Arah Kebijakan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Pembangunan Daerah**

#### **3.2.2.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2010-2013 menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dengan meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah obyek pajak sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2015 adalah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD dalam menghasilkan penerimaan Daerah yang diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Peningkatan pengawasan terutama terhadap kebocoran pungutan dan pungutan tidak tertagih pada retribusi dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Peningkatan layanan pajak di daerah terpencil misal dengan meningkatkan peran mobil samsat keliling.
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pemungut pajak dalam bentuk pelatihan sehingga lebih mudah beradaptasi dengan teknologi.
6. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan tentang perhitungan pajak.
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
8. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
9. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

10. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
11. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
12. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
13. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

#### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kerangka belanja daerah tahun 2015 provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari arahan kebijakan nasional. Terdapat beberapa arahan dari kementerian dalam negeri agar terjadi sinkronisasi kebijakan yang di tuangkan dalam dokumen RKPD serta di biyai oleh belanja daerah. Arahan tersebut adalah sebagai berikut

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik dilingkungan pemerintah daerah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal, maupun dibidang ketenagakerjaan yang didukung dengan perbaikan berbagai sarana serta prasarana pendidikan.
2. Mengoptimalkan pencapaian target tahun terakhir pelaksanaan Millenium Development Goals/MDG's tahun 2015.

3. Memastikan program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan kemandirian dan ketahanan pangan seperti diversifikasi pangan, distribusi dan ketersediaan kebutuhan pangan, mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, membuka atau mengembangkan lahan baru yang didukung dengan peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan serta membangun infrastruktur pertanian yang memadai.
4. Mensinergikan program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan provinsi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan desa. Selain daripada itu, program dan kegiatan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah harus dimulai dari tahun 2015.
5. Program dan kegiatan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian untuk dirumuskan dalam RKPD Tahun 2015 adalah dukungan pembangunan data kependudukan yang akurat berskala provinsi. Hal ini penting untuk kebutuhan pengalokasian anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Dengan demikian dapat diwujudkan data kependudukan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri sebagai data yang digunakan untuk semua keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Melanjutkan program dan kegiatan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.
7. Memastikan telah dirumuskannya program dan kegiatan antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana dalam RKPD. Hal ini bertujuan agar pemerintah provinsi senantiasa siap dan mampu menanggulangi masyarakat yang terkena dampak bencana dan segera dapat membangun kembali fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Hal ini

penting mengingat akhir-akhir ini sering terjadi bencana di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia.

8. Penerapan SPM dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah daerah mengingat pelayanan dasar yang berkualitas merupakan hak setiap warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan RKPD tahun 2015 perlu dipastikan adanya program dan kegiatan optimasi pencapaian target kinerja penerapan 9 (sembilan) SPM
9. Kebijakan pengelolaan lingkungan Melalui pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif untuk mencegah kerusakan hutan dan degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati akibat pengelolaan lahan yang tidak terkendali.
10. Program dan kegiatan dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup agar difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
11. Program dan kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
12. Dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua, yang secara efektif berlaku dalam Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka diprogramkan kegiatan untuk mendukung penataan kelembagaan, standar prosedur operasional, penyesuaian dan penerbitan regulasi termasuk kebijakan dan sistem akuntansi, serta peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur.

Sesuai dengan arahan kebijakan nasional diatas dan mempertimbangkan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja

daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya 10 Persen dari Belanja Daerah
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Stimulus belanja tersebut dilakukan untuk pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
6. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
7. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan,



Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan dan Kelurahan melalui berbagai program.

9. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewangan Pemerintah Provinsi.
10. Kebijakan belanja hibah di arahkan kepada badan /lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta mengikuti prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan;
11. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan khusus kepada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan desa dalam mendukung implementasi Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang desa.
12. Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS yaitu bahwa Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Adapun Komposisi Belanja Langsung yang dialokasikan di seluruh SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tercermin dalam pagu indikatif Tahun 2015 sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2015**

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>4.747.878.985.005,00</b>
1	Dinas Pendidikan	374.577.788.350,00
2	Dinas Kesehatan	53.899.814.590,00
3	RS Khusus Paru-Paru Batu	31.220.560.850,00
4	RSK. Paru-Paru Jember	32.426.950.000,00
5	RSK. Paru-Paru Dungus Madiun	17.560.000.000,00
6	RSK Kusta Kediri	9.415.347.547,00

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
7	RSK. Kusta Sumberg. Mojokerto	27.225.104.530,00
8	BKMM Surabaya	21.053.500.000,00
9	RSP Surabaya	24.751.852.730,00
10	BP 4 Pamekasan	14.324.000.000,00
11	BP 4 Madiun	10.824.052.688,00
12	UPT- Akademi Keperawatan Madiun	5.577.016.900,00
13	UPT- Akademi Gizi Surabaya	5.590.643.700,00
14	UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang	6.749.140.000,00
15	RSU Dr. Soetomo Surabaya	683.321.011.670,00
16	RSU. Dr. Syaiful Anwar Malang	417.495.300.000,00
17	RSU. Dr. Soedono Madiun	174.157.987.890,00
18	Rumah Sakit Haji Surabaya	158.487.901.330,00
19	RS Jiwa Menur Surabaya	40.867.080.000,00
20	DPU Bina Marga	469.570.000.000,00
21	DPU Pengairan	183.046.390.000,00
22	DPU Cipta Karya dan Tataruang	63.872.856.810,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86.946.750.000,00
24	Dinas Perhubungan dan LLAJ	232.335.072.080,00
25	Badan Lingkungan Hidup	19.931.910.000,00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14.733.219.500,00
27	Dinas Sosial	79.500.909.670,00
28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	90.990.750.000,00
29	Dinas Koperasi dan UMKM	140.719.795.750,00
30	Badan Penanaman Modal	58.588.660.000,00
31	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	63.510.466.850,00
32	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	27.080.999.000,00
33	Bakesbang & Politik	15.152.528.690,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja	12.672.322.000,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.915.481.000,00
36	Biro Adm. Pemerintahan Umum	9.810.450.000,00
37	Biro Adm. Kerjasama	12.189.950.000,00
38	Biro Hukum	7.135.200.000,00
39	Biro Adm. Perekonomian	29.090.624.000,00
40	Biro Adm. Pembangunan	16.029.450.000,00
41	Biro Adm. Sumber Daya Alam	22.824.000.000,00
42	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat	8.852.502.570,00
43	Biro Adm. Kemasyarakatan	15.503.836.190,00
44	Biro Humas dan Protokol	21.902.684.400,00
45	Biro Organisasi	11.562.450.000,00
46	Biro Umum Setda	63.208.559.460,00
47	Sekretariat DPRD	144.961.795.060,00
48	Badan Penelitian dan Pengembangan	15.221.000.000,00
49	Inspektorat Provinsi Jatim	21.979.215.000,00
50	Dinas Pendapatan	269.997.890.560,00
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	128.115.043.000,00

NO.	Urusan Pemerintahan / SKPD	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
52	Kantor Perwakilan	11.680.000.000,00
53	Badan KPPP Wilayah I Madiun	5.909.271.080,00
54	Badan KPPP Wilayah II Bojonegoro	5.929.010.000,00
55	Badan KPPP Wilayah III Malang	5.970.210.000,00
56	Badan KPPP Wilayah IV Pamekasan	6.220.500.000,00
57	Badan Kepegawaian Daerah	24.305.756.040,00
58	Badan Pendidikan dan Pelatihan	33.904.432.560,00
59	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	12.295.000.000,00
60	Badan Ketahanan Pangan	77.029.070.000,00
61	Badan Pemberdayaan Masyarakat	51.657.573.760,00
62	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.341.650.000,00
63	Sekretariat K P I D	5.864.700.000,00
64	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	25.389.000.000,00
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>970.715.150.700,00</b>
65	Dinas Pertanian	175.100.000.000,00
66	Dinas Perkebunan	123.792.066.000,00
67	Dinas Peternakan	142.138.500.000,00
68	Dinas Kehutanan	43.440.000.000,00
69	Dinas Energi dan SDM	24.348.500.000,00
70	Dinas Perikanan dan Kelautan	228.734.795.900,00
71	Dinas Perindustrian dan Perdag.	210.066.286.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.718.594.135.705,00</b>

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dari 2010 sampai dengan triwulan 1 tahun 2013 selalu mengalami penurunan, yang menandakan bahwa semakin membaiknya kondisi pengelolaan keuangan daerah, hal ini dilihat dari penerimaan pembiayaan yang dalam perkembangannya mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh penurunan SiLPA (SiLPA merupakan komponen utama), yang artinya sistem perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur semakin baik, selain itu juga terjadi penyerapan belanja di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk perkembangan pengeluaran pembiayaan daerah, hanya dilakukan pada 3 pos pembiayaan yaitu dana cadangan, pembayaran hutang, dan penyertaan modal (investasi) daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah khususnya sektor publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya

diharapkan mampu menjadi pendorong dan pengungkit bagi sektor *private* untuk tetap tumbuh dan terus berkembang melalui kebijakan *government expenditure*. Kebijakan ini juga diarahkan untuk dapat memberikan efek simultan pada roda perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kebijakan pengeluaran pemerintah daerah juga ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang dari waktu ke waktu terus menuntut peningkatan kualitas layanannya. Isu-isu tentang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perekonomian sektor produktif serta aspek kehidupan masyarakat yang lain harus menjadi prioritas.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung oleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap diarahkan mampu menjadi *back bone* Pendapatan Daerah. Intensifikasi Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor perlu mendapat perhatian, agar kebijakan yang dirumuskan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah tidak berakibat kontra produktif. Misalnya pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor justru berpeluang meningkatkan tunggakan pajak oleh karena ada hambatan administratif bagi wajib pajak dalam proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengingat sebagian besar kendaraan dalam kondisi terikat perjanjian kredit. Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus dikembangkan disamping memperkuat sumber-sumber yang telah ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah ini juga perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul atas hal tersebut. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diharapkan tetap mampu menjaga iklim usaha yang prospektif di Jawa Timur.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai

transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Potensi-potensi penerimaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah, Hasil penjualan kekayaan daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang dan Pencairan dana cadangan hendaknya dicermati dari sisi positif maupun negatifnya. Pada saat anggaran ditetapkan menggunakan sistem defisit maka penerimaan daerah merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan anggaran yang penggunaannya tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat.

Demikian pula pada saat APBD menggunakan sistem surplus maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembentukan dana cadangan, Pemberian pinjaman, Pembayaran pokok hutang, dan Investasi (Modal bergulir, Modal dasar dan Penyertaan Modal BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, efektifitasnya serta sebagai bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

### **1. Tantangan Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pembiayaan pembangunan daerah termasuk dalam ruang lingkup hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu *scarcity* sumber daya dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah daerah menjadi isu di semua daerah sehingga diperlukan penerapan kebijakan skala prioritas dalam penyelenggaraannya. Tantangan

pembiayaan pembangunan daerah tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan

1. Proporsi dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah belum mempertimbangkan Kapasitas fiskal daerah yang berbasis kebutuhan.
2. Regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada menurunnya potensi Pendapatan Daerah.

b. Skala prioritas belanja daerah

1. Lingkaran permasalahan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan mata rantai persoalan dan perlu penyelesaian secara komprehensif.
2. Karakteristik dan kultur masyarakat di Kabupaten/Kota yang heterogen.
3. Disparitas antar wilayah Kabupaten/Kota.

c. Efektifitas pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah

1. Seberapa besar *benefit* yang di dapatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya atas pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah.
2. Diperlukan pertimbangan yang cermat dengan skala prioritas tentang peruntukan pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan daerah.

## **2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

1. Penerimaan Pembiayaan

Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan direncanakan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Berdasarkan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah						
		REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD	PERKIRAAN	PERKIRAAN
		2012	2013	2014	2014	2015	MAJU 2016	MAJU 2017
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.359.475.040.000,00</b>	<b>1.753.509.144.118,83</b>	<b>682.544.725.307,00</b>	<b>813.990.632.000,00</b>	<b>838.410.350.960,00</b>	<b>863.562.661.489,00</b>	<b>889.469.541.333,00</b>
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	1.223.913.290.000,00	1.153.509.144.118,83	682.544.725.307,00	813.990.632.000,00	838.410.350.960,00	863.562.661.489,00	889.469.541.333,00
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	600.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	2.057.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	133.504.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	PENERIMAAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>445.483.330.000,00</b>	<b>540.833.333.333,36</b>	<b>8.233.333.334,00</b>	<b>162.733.333.334,00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	<b>400.000.000.000,00</b>
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	100.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00	300.000.000.000,00
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	337.250.000.000,00	30.100.000.000,00	0,00	152.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	8.233.333.334	10.733.333.333,36	8.233.333.334,00	10.733.333.334,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG DIPERLUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>913.991.710.000,00</b>	<b>1.212.675.810.785,47</b>	<b>674.311.391.973</b>	<b>651.257.298.666,00</b>	<b>638.410.350.960,00</b>	<b>563.562.661.489,00</b>	<b>489.469.541.333,00</b>

**Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013\*) (data anaudi**



#### **3.2.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah**

##### **1. Kemitraan Pembiayaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan, untuk mengatasi hal tersebut kebijakan Kebijakan Kemitraan Pembiayaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, diarahkan melalui Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yaitu dengan mensinergikan pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan baik yang bersumber dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. melalui pengembangan pembiayaan pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing.

##### **2. Kemitraan Pembiayaan Pembangunanm antara Pemerintah dengan Swasta.**

Kinerja Pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk dari Dunia Usaha melalui pelaksanaan Tanggungjawab sosial Perusahaan yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKB), serta dukungan Lembaga Non Pemerintah lainnya. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, program Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi Bina Lingkungan dan Sosial, Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Program Langsung pada Masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Penanganan Bencana Alam,

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan lain-lain. Realisasi Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan tahun 2013 yang dilaporkan kepada Sekretariat Tim Fasilitasi TSP Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2013.

NO.	PERUSAHAAN	TOTAL (Rp)
1	BANK UMKM	150.750.000
2	BNI	2.641.856.062
3	KAI DAOP 8	25.650.000
4	PLN DIST JATIM	2.224.090.000
5	BANK BRI	4.093.555.000
6	JASA TIRTA	1.004.800.000
7	PELINDO III	7.771.097.550
8	PT SIER	1.441.815.775
9	PT ASABRI	2.040.240.875
10	PT ASKES	47.504.000
11	PT BPD JATIM	9.917.663.884
12	PT JASA MARGA	970.763.900
13	PT JASA RAHARJA	806.600.000
14	PT PAL	2.128.380.000
15	PT PGN	13.380.639.935
16	PT SUCOFINDO	196.589.500
17	PT INDOLAKTO	146.642.000
18	PT PETROGAS JATIM UTAMA	312.456.224
19	PT KERTAS LECES	486.158.403
20	PT PDAB JATIM	288.236.293
21	PT PN XII	1.607.125.000
22	PT TASPEN	458.946.298
23	PT ASKRINDO	366.250.000
24	PT BANK BTN	1.478.560.000
25	PT ANGKASA PURA I	157.500.000
26	PT PN X	194.942.138.043
27	PT DANAREKSA	360.000.000
28	PT PN XI	38.550.494.435
29	PT PERTAMINA	14.178.496.250
	<b>TOTAL</b>	<b>302.174.999.427</b>

Sumber : BAPPEDA Prov. Jawa Timur

Berdasarkan tabel 3.10 diketahui bahwa pada tahun 2013 pelaksanaan TSP di Jawa Timur mencapai Rp. 257.262.320.292,- jumlah tersebut dilaporkan oleh 28 Perusahaan. Sehingga apabila Seluruh Perusahaan baik BUMS maupun BUMN dan BUMD melaporkan PKBL dan atau CSR yang dilaksanakan maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

Disisi lain dalam mendukung kesiapan Jawa Timur menuju Masyarakat Ekonomi Asia, peningkatan daya saing sudah menjadi tuntutan yang sangat mendesak dan salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah sangat terbatas, sehingga peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dapat menjadi potensi solusi alternative dalam pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka kebijakan Kemitraan Pembiayaan Pembangunan antara Pemerintah dengan Swasta, diarahkan pada :

- a. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/ *Public Private Partnership*, yaitu Pelibatan sector *private* dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain *build operate and transfer (BOT)*, *build transfer operate (BTO)*, *leases*, *concessions* diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Optimalisasi peran Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Provinsi Jawa Timur dengan Pelaksana CSR / PKBL dalam rangka Sinergi Program / Kegiatan Pembangunan Pemerintah dengan Program/Kegiatan CSR/PKBL.
- c. Optimalisasi Forum CSR dan Koordinator Wilayah PKBL dalam rangka peningkatan distribusi sasaran program/ kegiatan CSR dan PKBL di Jawa Timur

### **3. Kemitraan Pembiayaan Pembangunan dengan Lembaga Internasional.**

Berdasarkan data dari Biro Administrasi Kerjasama Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, di Jawa Timur terdapat 20 Lembaga Donor / Lembaga Internasional Non Pemerintah yang melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan di Jawa Timur. Program / Kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung program / kegiatan prioritas pembangunan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang menjadi lokasi kegiatan dan tidak bertentangan dengan budaya lokal, sehubungan dengan hal tersebut maka

Kemitraan Pembangunan dengan Lembaga Donor / Lembaga Internasional Non Pemerintah tahun 2015 diarahkan pada mengembangkan Kemitraan Pembangunan dengan Lembaga Donor / Lembaga Internasional Non Pemerintah dengan mengutamakan kepentingan Daerah dan berbasis budaya lokal.

**4. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri**

Kebijakan pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan pada bidang-bidang yang mempunyai derajat *certainty* yang tinggi utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.